



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	7 ( <i>tujuh</i> )
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Hari, Tanggal	:	Kamis, 25 Juni 2020
Pukul	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun Anggaran 2020
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Zulkifli Zaini beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 10.02 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 25 Juni 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan pencairan hutang pemerintah ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 45.426.981.473.100-** (*Empat Puluh Lima Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*) yang berupa kompensasi tarif Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk menutup pembayaran selisih antara biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah.
2. Komisi VI DPR RI akan membahas terkait Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun 2020 kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada Rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

PT PLN (Persero) diminta untuk melakukan efisiensi peningkatan kualitas pengelolaan daya dengan menggunakan *smart grade* yang dimulai dengan efisiensi dalam pencatatan meteran pelanggan dengan menggunakan digitalisasi (*smart meter*)

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.33 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2020  
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,

TTD.

**ARIA BIMA**  
A-189